

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran manajemen diharapkan dapat bekerja memenuhi permintaan prinsipal. Namun, ditemui ada konflik kepentingan antara agen dan prinsipal (Wolfensohn, 1999). Salah satu cara untuk mengurangi konflik antara agen dan prinsipal ini adalah dengan pengungkapan informasi oleh manajemen (agen), dimana sejalan dengan berkembangnya isu mengenai *corporate governance* yang di dalamnya terdapat prinsip transparansi dan akuntabilitas, akan meningkatkan perhatian terhadap masalah pengungkapan pada aspek *corporate governance* suatu perusahaan. Di Indonesia isu mengenai *corporate governance* muncul setelah terjadinya krisis multidimensi pada pertengahan tahun 1997. Krisis ini dimulai dengan merosotnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika yang kemudian menghancurkan sendi-sendi perekonomian, salah satunya pada sektor perbankan. Menurut hasil penelitian dan laporan dari Asia Development Bank, krisis yang terjadi di Indonesia dan runtuhnya perusahaan-perusahaan besar di dunia adalah disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan *Good Corporate governance*. Hasil penelitian *Political and Economic Risk* (PERC) tahun 1999 menyatakan indeks transparansi bisnis menunjukkan bahwa lingkungan bisnis di Indonesia relatif tidak transparan.

Awal tahun 1997 - 2000 merupakan kehancuran dunia perbankan di Indonesia. Puluhan bank dilikuidasi dan puluhan lagi dimerger akibat terus menerus menderita kerugian, baik bank milik pemerintah maupun milik swasta nasional. Kehancuran dunia perbankan Indonesia adalah akibat salah dalam pengelolaannya. Hancurnya dunia perbankan tersebut merupakan pelajaran berharga bagi para banker di Indonesia.

Salah kelola bank yang berdampak pada terpuruknya perekonomian nasional tersebut memberikan suatu kesadaran akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Belum diterapkannya *good corporate governance* disinyalir menjadi faktor utama berkepanjangannya krisis yang terjadi di Indonesia (Tangkilisan, 2003).

Konsep *good corporate governance* sebagai model pengelolaan perusahaan yang bersifat modern diyakini mampu membawa perubahan pengelolaan bank menjadi lebih baik dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan yang diwarnai ketatnya persaingan antar bank dalam merebut kepercayaan nasabah dan pengembangan usaha bank. Meskipun tidak menyebut tentang tata kelola atau *good corporate governance*, pentingnya pengelolaan perbankan secara baik agar bank menjadi industri yang sehat telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Penjelasan Umumnya dinyatakan bahwa "...terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif dengan didasari oleh landasan gerak."

Dalam aktivitas bisnis di Indonesia, istilah prinsip *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) relatif baru dikenal sejak satu

dekade terakhir, bahkan dalam perundang-undangan tentang badan usaha atau perusahaan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, istilah *Good Corporate Governance* belum dikenal sama sekali, sedangkan dalam aktivitas bisnis di Eropa dan Amerika Serikat, istilah ini sudah lama dikenal (Emirzon, 2007).

Raffles menyatakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* mulai menjadi perdebatan dan perbincangan hangat sejak terjadi kasus jatuhnya perusahaan besar dunia, seperti Enron dan WorldCom di Amerika Serikat, HIH Insurance dan One-tel di Australia pada permulaan abad ke-21, serta Parmalat di Italia pada awal dekade 2000-an. Sejak kejadian yang sangat fantastis dalam dunia bisnis ini membuka mata semua kalangan pebisnis dan pemerintahan betapa pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan bisnis.

Lebih lanjut, dikemukakan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan para regulator pemerintah dan analisis para pakar manajemen dapat disimpulkan penyebab utama jatuhnya perusahaan-perusahaan besar itu adalah karena lemahnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, di samping itu makin terpisahnya hubungan pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Kelemahan prinsip *Good Corporate Governance* itu antara lain ditandai oleh tiga macam hal, yaitu:

1. lemahnya peranan *the Board of directors* dalam mengendalikan pengelolaan perusahaan; *Board of directors* kurang aktif dalam menganalisis strategi bisnis perusahaan,

2. semakin bebasnya manajemen perusahaan mengelola harta dan hutang perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting yang bersangkutan dengan kelangsungan hidup perusahaan dan
3. tidak transparan, akurat dan tepat waktunya pengungkapan laporan perkembangan bisnis dan keuangan oleh *Board of directors* kepada pemegang saham dan kreditur.

Pengungkapan *corporate governance* yang ada di dalam laporan tahunan perusahaan dibutuhkan oleh pihak-pihak di luar perusahaan yang memiliki kepentingan di perusahaan tersebut. Penelitian Cadbury dalam Bhuiyan dan Biswas (2007) menyatakan bahwa pengungkapan *corporate governance* penting untuk dilakukan. Dengan adanya pengungkapan *corporate governance* yang akurat, tepat waktu, dan terbuka, maka akan menambah nilai bagi *stakeholder*. Sebaliknya, tanpa adanya pengungkapan *corporate governance* yang akurat, tepat waktu, dan terbuka, para *stakeholder* tidak dapat mengetahui bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen benar-benar untuk kepentingan mereka.

Perusahaan yang melakukan pengungkapan lebih luas akan dapat menurunkan ketidaksimetrisan informasi pasar, meningkatkan akurasi ekspektasi pasar dan dapat menarik perhatian penganalisis (Lang and Lundolm dalam Ainun Na'im dan Fu'ad Rakhman, 2000). Sebaliknya, kebijakan pengungkapan dengan kualitas informasi yang lebih rendah akan mengakibatkan perilaku yang oportunistik dalam pasar modal (Forker dalam Na'im dan Rakhman, 2000).

Luas pengungkapan pelaksanaan *corporate governance* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian Labelle dalam Kusumawati (2007) menunjukkan

bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *corporate governance* yaitu faktor karakteristik spesifik perusahaan dan faktor *corporate governance* itu sendiri. Karakteristik perusahaan di antaranya meliputi ukuran kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, jumlah aset perusahaan, tingkat likuiditas perusahaan, tipe industri, status perusahaan, dan lain sebagainya.

Karakteristik spesifik perusahaan dapat digunakan sebagai informasi oleh investor untuk menilai tata kelola sebuah perusahaan. Sehingga karakteristik spesifik perusahaan merupakan salah satu faktor penting bagi manajemen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk menentukan luas pengungkapan *corporate governance* diperlukan analisis karakteristik spesifik perusahaan untuk dapat mengetahui lebih besar biaya atau manfaat yang diperoleh dari pengungkapan tersebut (Suripto, 1999). Dalam penelitian ini, karakteristik spesifik perusahaan akan diperoleh dari laporan tahunan yang diterbitkan setiap perusahaan.

Dari penelitian sebelumnya telah diperoleh hasil yang beragam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*. Sebagai contoh, penelitian Hikmah dkk. (2011) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan ukuran perusahaan, umur listing perusahaan, kepemilikan dispersi, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris. Hasil dari penelitiannya yaitu ukuran perusahaan, umur listing perusahaan dan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Sedangkan kepemilikan dispersi dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap luas

pengungkapan *corporate governance*. Penelitian Rini (2010) dengan judul penelitian analisis luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia. Variabel independen yang digunakan besaran perusahaan, umur listing perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris. Hasil dari penelitiannya hanya besaran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Penelitian Almilia dan Retrinasari (2007) menggunakan variabel independen rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio *net profit margin*, besar perusahaan, dan status perusahaan. Hasil dari penelitiannya adalah rasio likuiditas, rasio *leverage*, besar perusahaan, dan status perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib. Tidak ada variabel yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Rasio likuiditas, besar perusahaan, dan status perusahaan berpengaruh terhadap luas kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Penulis sebelumnya telah menggunakan beberapa variabel faktor luas pengungkapan *corporate governance*. Akan tetapi, mereka tidak mengelompokkan variabel tersebut ke dalam karakteristik spesifik perusahaan. Dalam analisis penulis, secara garis besar faktor-faktor luas pengungkapan *corporate governance* dalam penelitian sebelumnya dikelompokkan menjadi dua yaitu berdasarkan karakteristik perusahaan dan berdasarkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penulis ingin menguji bagaimana pengaruh faktor-faktor luas pengungkapan *corporate governance* berdasarkan kelompoknya masing-masing. Menurut Wallace *et al.* (1994),” ... Karakteristik berkaitan dengan kinerja (*performance*) meliputi likuiditas perusahaan dan laba (*profit*)...” Karakteristik

yang tidak berkaitan dengan kinerja diantaranya: ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, tingkat leverage, umur listing perusahaan, proporsi pemegang saham, status perusahaan, dan karakteristik perusahaan lainnya. Penulis juga menambahkan faktor luas pengungkapan *corporate governance* lain yang juga mempengaruhi luas pengungkapan dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate governance* dalam Laporan Tahunan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan karakteristik spesifik perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* perusahaan
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan karakteristik perusahaan berkaitan dengan kinerja perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* perusahaan

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris:

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* .

2. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate governance* .
3. Pengaruh umur listing perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* .
4. Pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan *corporate governance* .
5. Pengaruh likuiditas terhadap luas pengungkapan *corporate governance* .

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dan juga memberikan referensi serta kontribusi penelitian empiris berkaitan dengan penelitian sejenis.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana perlakuan luas pengungkapan *corporate governance* di perusahaan perbankan. Selama ini penelitian terdahulu banyak membahas tentang topik di atas pada perusahaan manufaktur. Akan tetapi, penelitian pada perusahaan perbankan masih sedikit.
2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada investor sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam mengambil keputusan untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan melihat pada tata kelola perusahaan tersebut.